

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA
KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI SURABAYA
NOMOR 1/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby YANG MEMUTUS
BERSALAH TERDAKWA DALAM KASUS TINDAK PIDANA
KORUPSI**

Nama : Descha Govindha Faesrahman
Jurusan/Program Studi: Hukum/Ilmu Hukum
Pembimbing : Dr. Sudiman Sidabukke, S.H., C.N., M.Hum
Dr. Suhartati, S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Abstrak – Penelitian berjudul analisis putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Surabaya nomor 1/Pid.sus/TPK/2018/PN.Sby yang memutus bersalah terdakwa dalam kasus tindak pidana korupsi, dengan membahas apakah S yang telah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 01/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penelitian dengan pendekatan undang-undang, konsep dan kasus, diperoleh suatu kesimpulan sebagai berikut: bahwa S dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas tindakan pemalasan yang telah dilakukannya berdasarkan ketentuan Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena semua unsur-unsur dalam ketentuan pasal tersebut telah terpenuhi dengan alasan-alasan sebagai berikut: a. Perbuatan yang dilakukan oleh S bukan merupakan sebuah tindak pidana korupsi mengingat tidak dapat memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu merugikan keuangan negara atau perekonomian negara karena, tindakan yang dilakukan oleh S hanya sekedar melancarkan proses peralihan hak atas tanah negara menjadi hak milik dengan memalsukan surat-surat yang menjadi syarat pengajuan permohonan pengalihan hak atas tanah tersebut; b. Perbuatan yang dilakukan oleh S sudah ada niat untuk melakukan perbuatan tersebut dan S sudah dengan sengaja menggunakan surat yang sebelumnya telah di palsukan sebagai syarat permohonan pengalihan hak atas tanah negara menjadi hak milik; c. S termasuk orang yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana karena telah memenuhi semua unsur-unsur.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Pemalsuhan surat .

**ANALYSIS OF THE DECISION OF CRIMINAL ACTION OF
CORRUPTION IN THE STATE COURT OF SURABAYA
NUMBER 1 / Pid.Sus / TPK / 2018 / PN.Sby THAT DECIDES
FALSE ACCOUNTED IN THE CASE OF CRIMINAL ACTION
OF CORRUPTION**

Name : Descha Govindha Faesrahman
Department / Study Program : Law / Legal
Advisor : Dr. Sudiman Sidabukke, SH, CN, M.Hum
Dr. Suhartati, SH, M. Hum.

ABSTRACT

Abstract - decision analysis study entitled corruption court in Surabaya district court number 1 / Pid.sus / TPK / 2018 / PN.Sby which interrupt the defendant guilty in corruption case, to discuss whether the S who have committed criminal acts of corruption by Corruption Court Decision at the Surabaya District Court Number 01 / Pid.Sus / TPK / 2018 / PN.Sby can be accounted for under Article 263 of the Criminal Code. Research with a legal approach, concepts and cases, obtained a conclusion as follows: that S can be subject to criminal liability for acts of laziness that he has done based on the provisions of the Criminal Code Article, because all the elements in the provisions of the article have been fulfilled for the following reasons: a. The actions taken by S are not a criminal act of corruption considering that they cannot fulfill the elements contained in the provisions of Article 2 paragraph (1) of Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crime which is detrimental to state finances or the country's economy due to actions what is done by S is merely to launch the process of transferring rights to state land into ownership rights by falsifying documents which are a condition for submitting applications for the transfer of rights to the land; b. The action taken by S has the intention to carry out the act and S has used the letter which has been falsified as a condition of the application for the transfer of rights to state land to be the property; c. S includes people who can be subject to criminal liability for fulfilling all the elements.

Keywords : Criminal Liability, Letter forgery.